

ACTOR NETWORKS THEORY FORMULASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) GUNA MENDUKUNG PARIWISATA KOTA SURAKARTA

Yiino Puguh Martomo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Surakarta

email: tomounsa@gmail.com

Abstrak

Kota Surakarta yang lebih populer dengan sebutan Kota Solo merupakan destinasi utama wisata di Jawa Tengah. Kota Solo telah mencanangkan diri sebagai Kota MICE, disamping tetap fokus pada wisata leisure yang sedang melambat. Salah satu persoalan yang dihadapi dan dapat menimbulkan image negatif adalah banyaknya PGOT. Diperlukan kebijakan penanganan PGOT yang ideal dan dapat menampung semua aspirasi dan kepentingan-kepentingan serta menghindari dominasi pemerintah dan muatan politis perlu dibangun sebuah jejaring kebijakan. Actor Networks Theory dikembangkan oleh Michel Callon, Bruno Latour dan John Law, yang berpendirian bahwa masyarakat bukan hanya sekedar berisi individu-individu serta norma yang mengatur kehidupan mereka tetapi mereka bergerak pada sebuah jaringan, baik manusia subyek maupun obyek yang mungkin merupakan benda mati. Metode yang digunakan adalah pendekatan diskriptif kualitatif, lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang diteliti, juga dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik. Jejaring aktor perumusan kebijakan penanganan PGOT Kota Surakarta seharusnya terformulasikan dengan mengakomodasikan kepentingan para pihak yang terkait. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi manfaat bagi kepentingan publik akan tetapi juga mengakomodasi sisi kelompok sasaran dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Dalam implementasinya perlu daya terutama dalam penegakan sanksi. Secara terus menerus perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Pariwisata, Actor Networks Theory, Kebijakan, PGOT.*

1.. PENDAHULUAN

Kota Surakarta yang kemudian lebih populer disebut sebagai Kota Solo, mempunyai visi terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Misi mewujudkan masyarakat kota yang produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif membangun kesejahteraan kota. Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif, dan melayani. Misi Walikota Surakarta 3WMP (Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan). Untuk membangun kekuatan kerja menggunakan semboyan budaya 5Mantap (Mantap kejujuran, Mantap kedisiplinan, Mantap pelayanan, Mantap berorganisasi, dan Mantap gotong royong). Konsep dan program dibangun dengan keluwesan, mengaplikasikan program pemerintah dengan kekuatan *local genius*nya, menjadi kekuatan, konsistensi, komitmen, untuk membangun dan maju.

Visi tersebut tentu saja mendorong seluruh elemen untuk menangkap potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya adalah sektor pariwisata. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kota Surakarta merupakan destinasi atau tujuan utama wisatawan di Jawa Tengah. Pada awalnya Pemerintah Kota Surakarta lebih fokus menggarap wisata *leisure* atau yang bersifat rekreasi, namun karena terjadi perlambatan akhirnya mencoba menjajaki dan telah mencanangkan diri sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) maka diharapkan kunjungan wisatawan akan semakin meningkat. Konsep MICE adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan *leisure* dan *business*, biasanya melibatkan sekelompok orang yang secara bersama-sama. Banyak sektor terkait dengan industri MICE, yakni: industri perhotelan, restoran, kerajinan, biro perjalanan udara dan darat, kuliner/makanan khas setempat, penerjemah, dan lain-lain (Indrajaya, 2015).

Menangkap peluang seperti yang telah diuraikan diatas, salah satu persoalan yang dihadapi adalah keindahan dan kebersihan kota. Beberapa upaya sudah dilakukan dan hasilnya bisa dilihat seperti taman-taman kota, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sebagainya. Satu hal lagi yang dapat mengganggu dan menimbulkan *image* negatif adalah banyaknya pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Kota Surakarta. Hampir disetiap *traffic light* di penjuru kota dijumpai pengemis, gelandangan dan anak jalanan terutama setiap hari Selasa dan Jumat mereka berbondong-bondong di kawasan perdagangan seperti Pasar Gede dan Coyudan, dari Toko-ke Toko dengan bergantian dan beriringan seperti tidak ada putusnya dalam jumlah yang besar. Seakan menjadi kewajiban bagi para pemilik usaha dikawasan tersebut untuk menyediakan uang receh bagi mereka, dan ternyata kebanyakan mereka berasal dari luar wilayah Kota Surakarta.

Menangani masalah PGOT ini tentu saja tidak sesederhana menata taman atau membersihkan jalan-jalan akan tetapi memerlukan perlakuan khusus karena menyangkut harkat dan martabat seseorang bahkan akan lebih

rumit lagi jika dikaitkan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Penulis berkeyakinan tidak ada manusia yang berniat dan bercita-cita menjadi gelandangan atau pengemis.

Terdapat dua pendekatan untuk melihat persoalan ini. Pendekatan pertama adalah pendekatan kultur atau mental yang menyatakan bahwa persoalan gelandangan atau pengemis berawal dari kultur (budaya) manusia itu sendiri, yaitu mereka pemalas, tidak mau sekolah, tidak mau bekerja, bermental peminta-minta, hanya ingin cara instan saja dalam menjalani hidup. Pandangan ini menekankan bahwa mereka memang senang dan bersuka-cita mengulurkan tangan sembari mengeksplorasi kelemahan pada tubuh (penyakit, pakaian kumal, cacat tubuh, dan lain-lain) demi mendapatkan belas kasihan orang lain. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri dan kehidupan karena adanya budaya atau kebiasaan yang telah berlangsung secara kontinu (Siahaan, 2004).

Pendekatan kedua adalah pendekatan struktural, dengan pendekatan ini maka gelandangan dan pengemis lahir karena keterpaksaan, mereka dipaksa sistem atau struktur yang ada. Yakni struktur-struktur yang dibuat Negara baik struktur politik maupun sosial yang mengejwantahan dalam pembangunan bergaya *developmentalisme*. kemiskinan yang disebabkan oleh perencanaan atau dampak dari suatu kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah sehingga masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan secara berkelanjutan. Kemiskinan struktural menurut Selo Sumardjan adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Rahmatullah, 2013).

Masalah serius yang kemudian harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yaitu sebuah peraturan yang disatu sisi untuk menciptakan ketertiban umum, mendukung sektor pariwisata dan *image* Kota, disisi yang lain unsur humanismenya perlu mendapatkan perhatian agar tidak ada pengesampingan harkat martabat manusia serta Hak Azasi Manusia (HAM). Perumusan Kebijakan penanganan PGOT yang ideal dan dapat menampung semua aspirasi dan kepentingan-kepentingan serta menghindari dominasi pemerintah dan muatan politis perlu dibangun sebuah jejaring kebijakan.

2.. TINJAUAN PUSTAKA

Dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/theory_of_actor-network_theory, *often abbreviated as ANT, is an approach to social theory and research, originating in the field of science studies, which treats objects as part of social networks. Although it is best known for its controversial insistence on the capacity of nonhumans to act or participate in systems or networks or both, ANT is also associated with forceful critiques of conventional and critical sociology. Developed by science and technology studies (STS) scholars Michel Callon and Bruno Latour, the sociologist John Law, and others, it can more technically be described as a "material-semiotic" method. This means that it maps relations that are simultaneously material (between things) and semiotic (between concepts). It assumes that many relations are both material and semiotic.*

Teori jaringan aktor yang sering disingkat ANT adalah pendekatan untuk teori sosial dan untuk penelitian, yang memperlakukan benda sebagai bagian dari jaringan sosial. Teori ini sangat berpengaruh besar pada bidang ilmu sains dan teknologi (STS). Dikembangkan oleh Michel Callon dan Bruno Latour dan John Law, yang berpendirian bahwa masyarakat bukan hanya sekedar berisi individu-individu serta norma yang mengatur kehidupan mereka tetapi mereka bergerak pada sebuah jaringan, penemuan ilmiah tidak hanya berasal dari satu orang tertutup saja akan tetapi berasal dari jaringan baik manusia sebagai subyek maupun obyek yang mungkin merupakan benda mati.

Istilah *networks* mengandung dua arti yaitu pertama, berarti menjalin kontak untuk mendapat keuntungan dan arti kedua berasal dari bahasa teknologi komputer yakni komputer yang saling berhubungan (Parson, 2011:186-187). Aldrich dan Watten lebih melihat *networks* sebagai suatu sistem, yaitu totalitas keseluruhan unit yang saling terhubung dengan relasi tertentu yang pasti. Jadi jaringan (network) menurut digunakan untuk menunjukkan pola hubungan antar individu antar kelompok dan antar organisasi. Jaringan dapat berbentuk formal atau informal para area lokal atau interlokal maupun ikatan bisnis ataupun intersektor.

Actor network theory yang dikembangkan oleh Michel Callon dan Bruno Latour dan John Law menerangkan fenomena sosioteknis, terlebih dahulu disampaikan penggunaan makna jejaring dalam frase jejaring-aktor.

- a. Jejaring disini bukan merupakan kanal-kanal yang *fixed and finalized*, dan tidak memiliki simpul-simpul yang *pre-established*.
- b. Makna jejaring di sini juga berbeda dari makna jejaring dalam istilah jejaring sosial di dalam teori-teori sosial. Dalam kajian jejaring sosial, perhatian ditujukan pada relasi-relasi social dari individu-individu (aktor manusia) frekuensi, distribusi, dan homogenitas dari relasi-relasi ini. Perhatian ANT tertuju pada relasi-relasi heterogen yang mencakup ke entitas-entitas bukan manusia objek-objek teknologi dan natural.

Jejaring-aktor merupakan konsep ontologis yang menunjuk pada suatu fenomena *becoming* bagaimana sesuatu menjadi dan menghasilkan efek-efek. Menurut ANT, agen sosial tidak pernah berlokasi pada tubuh atau

tubuh-tubuh semata, tetapi merupakan jejaring relasi-relasi heterogen yang berpola, atau merupakan efek dari jejaring seperti ini.

Dalam kerangka kerja teoretik ANT, berfungsinya teknologi di masyarakat dijelaskan sebagai produk atau efek dari jejaring relasi-relasi heterogen yang mencakup agen-agen dan lembaga-lembaga sosial, mesin-mesin, objek-objek teknologi dan organisasi-organisasi. Jejaring kebijakan ANT melalui proses sebagai berikut:

- a. *Punctualization* (memperlakukan jaringan sebagai aktor unyuk mengurangi kompleksitas jaringan).
- b. *Translation* (penyelarasan keinginan bermacam aktor).
 - 1) *Problematization* (mendefinisikan kepentingan aktor lain yang konsisten dengan kepentingannya sendiri)
 - 2) *Obligatory Passage Point* (situasi yang diciptakan agar semua aktor puas terhadap kepentingan yang didistribusikan)
 - 3) *Interessement* (proses meyakinkan aktor lain untuk menerima kepentingannya)
 - 4) *Enrollment* (penerimaan kepentingan)
 - 5) *Inscription* (penciptaan artefak dan simbol)
 - 6) *Speaker/delegate representative* (juru bicara atas nama aktor)
 - 7) *Betrayal* (situasi dimana aktor tidak mematuhi kepentingan suatu aktor)
 - 8) *Irreversibility* (penciptaan alternatif kepentingan lain atau kembali ke kondisi semula)

Hal yang penting dalam proses kebijakan publik adalah formulas kebijakan (*policy formulation*). Begitu pentingnya tahap formulasi kebijakan maka tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam siklus kebijakan publik. Mengapa? Karena formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik. Formulasi kebijakan bukan pekerjaan yang main-main tapi sebaliknya sebuah tugas berat karena membutuhkan mengkajian dan keseriusan dari aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan. Kekeliruan atau kesalahan dalam formulasi kebijakan akan berdampak pada proses implementasi, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru hanya bersifat politis.

Agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu alternatif yang dilakukan adalah kemauan pemerintah untuk membangun jaringan dengan aktor diluar pemerintah, yaitu aktor *private* dan aktor *civil society*. Pemerintah sudah tidak tepat lagi memandang aktor-aktor tidak resmi sebagai "lawan politik" tapi sudah saat pemerintah menjadikan aktor-aktor itu sebagai "sahabat" dalam membicarakan produk-produk kebijakan publik di daerah.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dalam pendekatan ini lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang diteliti. Penelitian kualitatif juga dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014:6). Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya yaitu peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti namun selanjutnya setelah fokus penelitian sudah jelas, kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang harapannya dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan pada saat observasi dan wawancara (Sugiono, 2012:400).

Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss & Corbin, 2013:5). Prosedur pendekatan kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara berkelanjutan dengan menggunakan tehnik *snowball sampling*, adalah tehnik penentuan sampel (informan) yang mula-mula berjumlah kecil, kemudian membesar (Sugiono, 2012:99).

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu.

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif (*interaktive model of analysis*) meliputi; (1) Pengumpulan data, merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terhadap masalah penelitian. (2) Kondensasi data, mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, fokus, abstrak dan atau mengubah data yang muncul di dalam corpus penuh (tubuh) dari catatan yang ditulis di lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahani empiris lainnya. (3) Sajian data, merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat sajian data. (4) Menarik kesimpulan atau verifikasi, dalam tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi (Miles, B Mathew, Huberman, A Michael and Saldana, 2014:32-33).

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, data yang sudah terkumpul harus dicek keabsahannya dengan teknik triangulasi (Moleong, 2014:324). Triangulasi artinya untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Penelitian ini menggunakan triangulasi data atau triangulasi sumber, bertujuan untuk menjaga validitas data atau meminimalisir kemungkinan data akan menjadi bias. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu peneliti mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari persoalan bagaimana membuat model jejaring kebijakan dalam formulasi kebijakan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang ideal maka penanganan perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. dan dapat menampung semua aspirasi dan kepentingan-kepentingan serta menghindari dominasi pemerintah dan muatan politis perlu dibangun sebuah jejaring kebijakan.

Pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat. Untuk itu diperlukan penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemis. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga negara Republik Indonesia. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.

a. Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Aktor Dalam Kebijakan Penanganan PGOT di Kota Surakarta berdasarkan Actor Network Theory yang perlu yang dilibatkan dalam membuat formulasi kebijakan penanganan gelandangan dan penngemis di Kota Surakarta adalah sebagai berikut : DPRD Kota Surakarta, Pemkot Kota Surakarta yang sekaligus terlibat sebagai pelaksana kebijakan meliputi Walikota, Bapermas dan Satpol PP serta Bappeda. Sedangkan dari unsur diluar pemerintah adalah Lembaga Kesejahteraan sosial, Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Dunia Usaha, Dunia Pariwisata, Rumah Rehabilitasi, Rumah Sakit Jiwa, dan Media Massa.

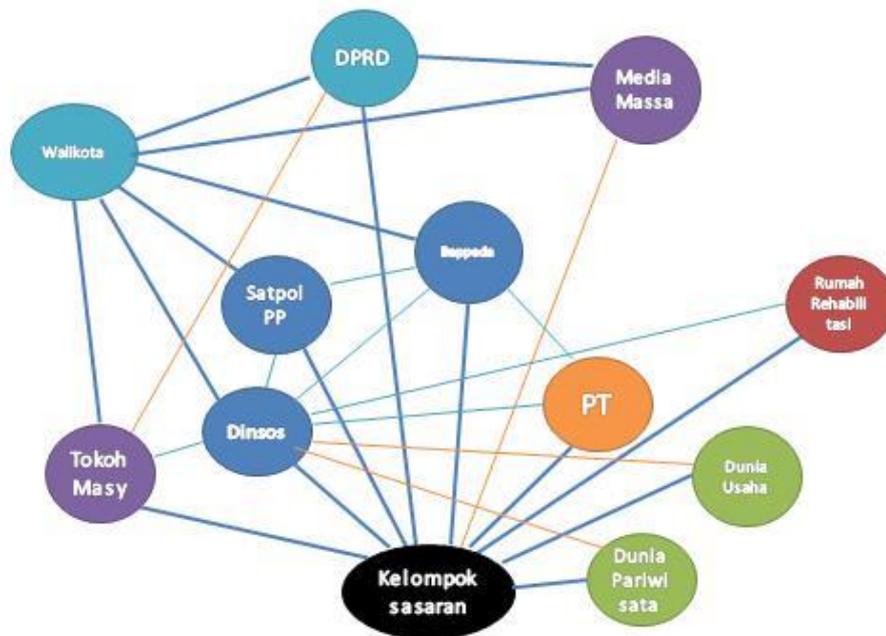
Dapat penulis petakan pada Tabel 1. aktor yang terlibat untuk dianalisis perannya dalam jejaring kebijakan dengan klasifikasi aktor primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut:

Tabel 1. Peran Aktor Jejaring Kebijakan Penanganan PGOT Kota Surakarta

Primer	Sekunder	Tersier
<ul style="list-style-type: none"> • Walikota • DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Satpol PP • Bappeda • Lembaga Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi • Dunia Usaha (CSR) • Dunia Pariwisata • LSM • Rumah Rehabilitasi • Tokoh Masyarakat • Kelurahan/RW/RT • Media Masa

b. Jejaring Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Sedangkan jejaring Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis dapat digambarkan dalam bentuk model sebagai berikut:



Gambar 1. Model Model Jejaring Aktor Kebijakan Penanganan PGOT Kota Surakarta.

Dari Gambar1. model tersebut dapat didiskripsikan bahwa Walikota sebagai penanggung jawab wilayah berperan sebagai aktor utama berinisiatif bersama-sama dengan DPRD untuk memformulasikan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis tentunya setelah mendapat pressure dari unsur-unsur masyarakat terkait kepentingan pariwisata dan image kota yang bersih. Walikota menugaskan Dinas Sosial sebagai leading sektor didampingi Satpol PP dan Bappeda, selain itu membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai lembaga resmi diluar pemerintah yang dilibatkan aktif untuk merumuskan dan nantinya berperan dalam implementasi atau lebih tepatnya sebagai lembaga pendamping masyarakat sasaran. Walikota juga aktif sebagai sumber utama dalam pemberitaan media agar terbentuk opini publik yang positif.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai Leading sektor dalam hal ini Dinas Sosial sesuai dengan tupoksinya menangani masalah kemiskinan dan orang terlantar, berperan mengidentifikasi dan mengkoordinasikan dengan aktor lain yang terkait serta berkomunikasi langsung dengan masyarakat sasaran kebijakan. Dinas Sosial juga bertanggung jawab untuk melaporkan setiap progress kepada Walikota.

Satpol PP sebagai OPD pendamping yang berperan dalam penegakan Perda dan penertiban masyarakat sasaran. Bappeda sebagai OPD pendamping berperan sebagai aktor perencana dan support data yang diperlukan, agar perencanaan dan *support* data valid Bappeda menggandeng aktor Perguruan Tinggi, Sebagai leading sektor Dinas Sosial juga mengkondisikan aktor privat dalam hal ini dunia usaha dan dunia pariwisata untuk berperan aktif mendukung baik dalam bentuk fasilitas-fasilitas maupun sumbangan pemikiran dan tenaga, demikian pula berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi sebagai aktor intelektual untuk mendapatkan kajian-kajian ilmiah.

Yang tidak kalah penting adalah aktor yang nantinya akan menangani dan menampung masyarakat sasaran tentunya dengan cara yang manusiawi yaitu Rumah Rehabilitasi dan Rumah Sakit Jiwa harus dikondisikan berkomitmen tidak hanya melakukan perawatan akan tetapi juga memberikan bimbingan mental, melatih kemandirian berupa pelatiba kewirausahaan dan lain sebagainya.

Aktor berikut yang berasal dari tokoh masyarakat baik dari unsur agama maupun adat, tentu saja diberdayakan untuk meyakinkan pada masyarakat sasaran agar mereka bersedia untuk ditata. Aktor bersama-sama dengan LSM yang bergerak dalam bidang sosial ini juga dapat berperan sebagai pihak yang mengadvokasi dan mengedukasi kelompok sasaran.

Aktor terakhir dalam jejaring kebijakan ini adalah Kelurahan/RW/RT berperan dalam mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemis di lingkungannya, melaporkan kepada Pemerintah Kota Surakarta apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis, melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah di bidang sosial, menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Setelah para aktor yang sudah terbentuk dalam sebuah model

jejaring melakukan komunikasi, diskusi dan berkolaborasi akhirnya diambil sebuah keputusan tentang penanganan gelandangan dan anak jalanan yang manusiawi, artinya melalui upaya preventif, koersif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Formulasi kebijakan penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dengan membangun jejaring aktor kebijakan atau *Actor Networks Theory* akan menghasilkan kebijakan yang menguntungkan *stakeholders*, tidak hanya pada para pemangku kepentingan seperti sektor ketertiban umum dan sektor pariwisata serta masyarakat luas yang merasa terganggu, akan tetapi juga pada PGOT itu sendiri. Formulasi kebijakan penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dengan membangun jejaring dengan aktor sukarelawan dan pemerhati masalah sosial (*philanthropy association*) tentu saja akan memperjuangkan hak azasi sebagaimana layaknya warga masyarakat dan memperlakukan mereka secara manusiawi sesuai harkat dan martabatnya.

E. PENUTUP

Melalui jejaring aktor perumusan kebijakan penanganan Pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Kota Surakarta tersusun dengan telah mengakomodasikan kepentingan para pihak yang terkait. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi manfaat bagi kepentingan publik akan tetapi juga mengakomodasi sisi kelompok sasaran dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka sebagai manusia.

Yang perlu menjadi perhatian adalah dalam implementasi nantinya jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi “*macan ompong*” yang tidak mempunyai daya dalam implementasinya terutama dalam penegakan sanksi. Oleh karena itu perlu secara terus menerus dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat, karena penegakan kebijakan ini tidak hanya berimbas kepada kelompok sasaran, tetapi juga pemberian sanksi kepada masyarakat pemberi uang, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.

Kota Solo yang bersih, tertata dan dapat menjaga ketertiban umum utamanya bersih dari PGOT, tentu saja akan menjadikan magnet sebagai destinasi wisata, baik yang di desain dengan konsep *leisure* maupun dengan konsep MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [2] Callon, M., 2003. “Actor Network Theory - The Market Test”. <http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Callon-Market-Test.pdf>.
- [3] Latour, B., 1999. *Pandora's Hope : Essays on The Reality of Science Studies*. Harvard University Press; London, England.
- [4] Maleong, Lexi J., 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Remaja Rosdakarya.
- [5] Milles, B Mathew & Huberman A Michael, 2014, *Qualitative Data Analysis*, Third Edition Copyright © 2014 SAGE Publications, Inc.
- [6] N.H.T Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- [7] Parson, Wayne, 2011. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- [8] Rahmatullah Rahmat. 2013. Budaya Kemiskinan dan Kemiskinan Struktural. <http://www.rahmatullah.net/2013/08/kebudayaan-kemiskin-dan-kemiskin-an.html>.
- [9] Sugiyono, 2012. *Metodelogi Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Jakarta.
- [10] Titus Indrajaya, 2015. Potensi Industri Mice (Meeting, Incentive, Conference And Exhibition) Di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Widya Vol. 3 No. 2*.